



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 6 Tahun 2024 Page 9045-9057

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Peran Partai Politik Terhadap Pembentukan Kebijakan Publik

Hidayatuddin<sup>1✉</sup>, Padrisan Jamba<sup>2</sup>

Prodi Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam

Email: [pb210710014@upbatam.ac.id](mailto:pb210710014@upbatam.ac.id)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Partai politik memegang peran krusial dalam sistem politik Indonesia, terutama dalam pelaksanaan demokrasi perwakilan. Mereka bukan hanya menjadi perpanjangan tangan rakyat di tingkat legislatif dan eksekutif, tetapi juga menjadi saluran utama partisipasi politik warga negara dalam proses pengambilan keputusan pemerintah. Dengan latar belakang sejarah partai politik di Indonesia dan evolusi perannya, penelitian ini mengeksplorasi peran partai politik dalam membentuk kebijakan publik. Pentingnya peran partai politik dalam demokrasi perwakilan tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan UU Nomor 31 Tahun 2002. Namun, meskipun peran mereka semakin diakui, masih terdapat beberapa permasalahan, seperti kurangnya kualitas kader, transparansi keuangan, dan praktik politik uang dalam pemilihan umum. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan data sekunder melalui studi literatur dan dokumen. Rumusan masalah menyoroti peran partai politik dalam membentuk kebijakan publik, serta bagaimana mereka mempengaruhi proses pembuatan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran partai politik sangat kompleks, melibatkan fungsi input dan output. Sebagai input, mereka menentukan agenda kebijakan, memberikan dukungan atau kritik terhadap kebijakan, mengawasi pelaksanaan kebijakan, dan memobilisasi masyarakat. Meskipun demikian, tantangan seperti kurangnya kualitas kader, kurangnya transparansi keuangan, dan praktik politik uang masih perlu diatasi. Dalam membahas peran partai politik, penelitian ini menggaris bawahi pentingnya reformasi internal, peningkatan transparansi keuangan, dan pemberantasan praktik politik uang. Penguatan partai politik diharapkan dapat memberikan dampak positif pada stabilitas politik dan pembangunan negara secara keseluruhan, memastikan bahwa mereka memenuhi perannya sebagai representatif masyarakat dan agen perubahan yang konstruktif dalam merumuskan kebijakan publik.

Kata Kunci: *Partai politik, Demokrasi Perwakilan, Kebijakan Publik, Peran Partai Politik*

## Abstract

Political parties play a crucial role in the political system of Indonesia, especially in the implementation of representative democracy. They serve not only as an extension of the people in the legislative and executive branches but also as the primary channel for citizens' political participation in the government decision-making process. With a background in the history of political parties in Indonesia and the evolution of their roles, this research explores the role of political parties in shaping public policies. The importance of the role of political parties in representative democracy is reflected in the 1945 Constitution and Law Number 31 of 2002. However, despite their increasingly recognized role, there are still several issues, such as the lack of quality cadres, financial transparency, and the practice of money politics in elections. This research employs a qualitative descriptive analysis method, collecting secondary data through literature and document studies. The problem formulation highlights the role of political parties in shaping public policies and how they influence the policy-making process. The research findings indicate that the role of political parties is highly complex, involving both input and output functions. As input, they determine policy agendas, provide support or criticism of policies, oversee policy implementation, and mobilize the public. Nevertheless, challenges such as the lack of quality cadres, financial transparency, and the practice of money politics still need to be addressed. In discussing the role of political parties, this research emphasizes the importance of internal reforms, increased financial transparency, and the eradication of money politics. Strengthening political parties is expected to have a positive impact on political stability and overall national development, ensuring that they fulfill their roles as representatives of the people and constructive agents of change in formulating public policies.

*Keywords: Political Parties, Representative Democracy, Public Policy, Role of Political Parties*

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Partai politik merupakan elemen krusial dalam dinamika sistem politik Indonesia, terutama dalam pelaksanaan demokrasi perwakilan. Peran partai politik tidak hanya terbatas pada tingkat legislatif, tetapi juga merambah ke tingkat eksekutif, di mana anggotanya memainkan peran vital dalam mewakili aspirasi rakyat serta memperjuangkan kepentingan bersama yang dipilih melalui pemilihan umum (pemilu). Dalam kerangka ini, partai politik menjadi saluran utama bagi partisipasi politik warga negara, memungkinkan mereka untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan pemerintah.

Pentingnya peran partai politik dalam demokrasi perwakilan tercermin dalam UUD 1945, yang menegaskan tanggung jawab partai politik dalam menyiapkan calon pemimpin dan merancang kebijakan publik. Partai politik bukan hanya sebuah entitas formal di atas kertas, tetapi juga sebuah entitas dinamis yang secara aktif terlibat dalam membentuk arah kebijakan negara dan memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Asal mula partai politik di Indonesia dapat ditelusuri kembali ke masa penjajahan Belanda, di mana partai-partai politik pertama kali muncul sebagai wadah untuk mengorganisir perlawanan terhadap penjajah. Setelah kemerdekaan Indonesia, peran partai politik tetap relevan, tidak hanya sebagai perpanjangan tangan rakyat, tetapi juga sebagai pemain kunci dalam proses pembangunan nasional.

Seiring dengan perkembangan zaman, peran partai politik semakin meluas, menjadi penghubung esensial antara rakyat dan pemerintah. Keberadaannya menjadi semacam jembatan yang menghubungkan dua entitas yang mungkin memiliki kepentingan berbeda. Seiring berjalannya waktu, partai politik di Indonesia mengalami transformasi signifikan, seiring dengan evolusi ide dan pandangan politik masyarakat (Isabela, 2022).

Era reformasi menjadi tonggak penting dalam sejarah partai politik Indonesia. Pada masa Orde Baru, partai politik terbatas hanya pada tiga entitas besar, yaitu Partai Demokrasi Indonesia (PDI), Partai Golongan Karya (PGK), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Namun, setelah reformasi, pemandangan politik berubah drastis, dan jumlah partai politik melejit menjadi lebih dari seratus. Hal ini mencerminkan semakin tingginya minat masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses politik, seiring dengan semakin terbukanya ruang demokrasi di Indonesia.

Meski peran partai politik semakin diakui, terdapat beberapa permasalahan yang perlu diatasi. Salah satu permasalahan utama adalah kurangnya kualitas kader partai politik. Kader yang berkualitas menjadi kunci keberhasilan sebuah partai politik dalam mencapai tujuannya. Selain itu, transparansi dalam pengelolaan keuangan partai politik juga menjadi isu yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut. Pengelolaan keuangan yang tidak transparan dapat merongrong integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik.

Tak kalah penting, masih adanya praktik politik uang dalam pemilihan umum menjadi tantangan serius bagi demokrasi Indonesia. Praktik ini dapat menggiring proses pemilihan umum ke arah yang tidak sehat dan merusak esensi demokrasi. Oleh karena itu, langkah-langkah konkrit perlu diambil untuk memberantas praktik ini dan memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang adil dan setara dalam proses politik.

Dalam merespon permasalahan tersebut, partai politik dan pemerintah perlu bekerja sama untuk meningkatkan kualitas kader, meningkatkan transparansi keuangan, dan memberantas praktik politik uang. Penguatan partai politik akan membawa dampak positif pada stabilitas politik dan pembangunan negara secara keseluruhan. Dengan begitu,

partai politik dapat memenuhi perannya sebagai representatif masyarakat dan agen perubahan yang konstruktif dalam merumuskan kebijakan publik.

Kebijakan publik tidak disusun tanpa maksud dan tujuan tertentu. Kebijakan publik dirancang untuk mengatasi beragam masalah publik di masyarakat, yang memiliki berbagai jenis, variasi, dan tingkat keintensitasan. Tidak semua permasalahan publik dapat menjadi dasar pembentukan kebijakan publik. Hanya masalah publik yang mampu mendorong partisipasi banyak orang dalam pemikiran dan pencarian solusi yang dapat menghasilkan suatu kebijakan publik (Skandar, 2017).

## B. Perumusan Masalah

Permasalahan yang ingin dipecahkan dalam penelitian ini adalah apa peran partai politik dalam pembentukan kebijakan publik di Indonesia serta bagaimana partai politik mempengaruhi proses pembuatan kebijakan tersebut.

## METODE PENELITIAN

Penulisan ini menerapkan pendekatan analisis kualitatif deskriptif. Dalam menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif, pengumpulan dan evaluasi data dilaksanakan melalui studi kepustakaan serta akuisisi data sekunder dari referensi yang tersedia. Informasi dan data diperoleh melalui eksplorasi studi literatur dan dokumen sebagai sumber utama dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Apa saja peran partai politik dalam membentuk kebijakan publik

Partai politik, sebagai entitas integral dalam sistem politik Indonesia, memegang peran yang sangat penting dalam melaksanakan demokrasi perwakilan. Melalui anggota-anggotanya yang duduk di lembaga legislatif dan eksekutif, partai politik menjadi perwakilan rakyat yang memperjuangkan kepentingan bersama yang dipilih melalui pemilihan umum (pemilu). Lebih dari sekadar menjadi wakil rakyat, partai politik juga berfungsi sebagai saluran partisipasi politik bagi warga negara, memungkinkan mereka untuk aktif memengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah.

Dalam kerangka demokrasi perwakilan, peran partai politik sangat kompleks dan melibatkan serangkaian fungsi esensial. Pertama-tama, partai politik memiliki tanggung jawab untuk menyiapkan calon pemimpin, baik di tingkat legislatif maupun eksekutif. Proses ini menjadi dasar bagi terwujudnya kepemimpinan yang representatif dan dapat mengartikulasikan aspirasi masyarakat. Selain itu, partai politik juga harus merancang

rencana pola dan arah kebijakan publik yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan rakyat. Oleh karena itu, partai politik bukan hanya sekadar alat formal di dalam sistem politik, tetapi juga menjadi pilar utama dalam pembentukan arah kebijakan nasional.

Pentingnya peran partai politik dalam demokrasi perwakilan tidak hanya bersumber dari tugas dan tanggung jawabnya, tetapi juga ditegaskan secara eksplisit dalam dua pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 6A dan 22E bahwa partai politik memiliki peran sentral dalam memastikan representasi rakyat yang baik dan kebijakan publik yang berpihak pada kepentingan masyarakat secara luas, Pasal 1 UU Nomor 31 Tahun 2002 "Partai Politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum". Menurut Carl Frederick, "kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu. Tindakan ini direncanakan dengan mempertimbangkan ancaman dan peluang yang muncul, menciptakan suatu rencana strategis untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan kesempatan yang ada" (Risnawan, 2017).

Pengaruh partai politik terhadap kebijakan publik tidak dapat dipandang sebelah mata. Mereka memiliki sejumlah peran kunci dalam membentuk kebijakan yang memengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat. Pertama, partai politik diharapkan untuk mendorong dan mengawasi kebijakan publik. Ini mencakup kemampuan partai politik untuk menentukan agenda politik, memberikan dukungan atau kritik terhadap kebijakan yang diusulkan, serta memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan secara substansial berpihak pada kepentingan masyarakat (Wardana, 2023).

Selain itu, partai politik juga diharapkan menyediakan alternatif kebijakan yang konstruktif. Alternatif ini bukan sekadar jargon politik, tetapi harus didasarkan pada data dan fakta yang akurat, mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara menyeluruh. Partai politik, dengan demikian, memiliki peran sebagai penyeimbang dan penawar atas berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat (Ahmad Naufal, 2023).

Tidak hanya itu, partai politik juga berkewajiban mengawasi pelaksanaan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Mereka harus memastikan bahwa kebijakan yang telah disahkan dapat dilaksanakan dengan efektif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dalam hal ini, partai politik berperan sebagai pengawas pelaksanaan kebijakan, menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam tindakan pemerintah.

Peran edukatif partai politik juga tidak dapat diabaikan. Mereka harus berusaha untuk mengedukasi masyarakat tentang kebijakan publik yang telah ditetapkan. Hal ini

mencakup penjelasan mengenai tujuan dan manfaat dari kebijakan tersebut agar masyarakat dapat memahami konteksnya. Masyarakat yang teredukasi akan lebih mampu berpartisipasi secara aktif dalam proses politik dan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kebijakan yang memengaruhi kehidupan mereka.

Selanjutnya, partai politik memiliki hak dan tanggung jawab untuk mengajukan usulan kebijakan kepada pemerintah. Usulan ini harus didasarkan pada data dan fakta yang akurat serta mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara menyeluruh. Dengan mengajukan usulan kebijakan, partai politik aktif terlibat dalam membentuk agenda kebijakan nasional dan menunjukkan komitmen mereka untuk memberikan solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Meskipun peran partai politik sangat penting, tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah kurangnya kualitas kader partai politik. Kader yang berkualitas menjadi kunci keberhasilan sebuah partai politik dalam mencapai tujuannya. Kualitas kader tidak hanya mencakup keahlian politik, tetapi juga integritas dan keterlibatan aktif dalam masyarakat.

Tak kalah penting, transparansi dalam pengelolaan keuangan partai politik juga menjadi isu yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut. Pengelolaan keuangan yang tidak transparan dapat merongrong integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam hal ini. Selain itu, masih adanya praktik politik uang dalam pemilihan umum menjadi tantangan serius bagi demokrasi Indonesia. Praktik ini dapat merusak integritas pemilihan umum dan mengarahkan proses politik ke arah yang tidak sehat (Ridwan, 2022). Oleh karena itu, perlu diambil langkah-langkah tegas untuk memberantas praktik politik uang, seperti penegakan hukum yang kuat dan peningkatan kesadaran masyarakat.

Dalam merespon permasalahan tersebut, partai politik dan pemerintah perlu bekerja sama untuk meningkatkan kualitas kader, meningkatkan transparansi keuangan, dan memberantas praktik politik uang. Penguatan partai politik akan membawa dampak positif pada stabilitas politik dan pembangunan negara secara keseluruhan. Dengan begitu, partai politik dapat memenuhi perannya sebagai representatif masyarakat dan agen perubahan yang konstruktif dalam merumuskan kebijakan publik. Untuk mencapai hal ini, perlu dilakukan reformasi internal di dalam partai politik. Reformasi ini mencakup peningkatan seleksi kader, pelatihan intensif untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan, dan penerapan mekanisme pengawasan internal yang lebih ketat. Selain itu, penting juga untuk memperkuat lembaga-lembaga pengawas independen yang dapat mengawasi

pengelolaan keuangan partai politik dan melaporkan setiap pelanggaran etika atau hukum.

Peningkatan transparansi dalam pengelolaan keuangan partai politik dapat dicapai dengan menerapkan sistem akuntansi yang lebih terbuka dan akurat. Laporan keuangan partai politik harus mudah diakses oleh masyarakat umum, dan lembaga pengawas independen harus memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memverifikasi laporan keuangan tersebut secara berkala.

Selain itu, langkah-langkah pencegahan praktik politik uang perlu diperkuat. Penegakan hukum yang tegas dan adil terhadap pelaku praktik politik uang harus menjadi prioritas utama. Selain itu, pendidikan politik masyarakat perlu ditingkatkan agar mereka lebih peka terhadap praktik-praktik yang merugikan demokrasi.

Dalam hal ini, media massa juga memiliki peran besar dalam memberikan informasi yang akurat dan obyektif mengenai kegiatan partai politik dan pemilihan umum. Media massa harus berfungsi sebagai penjaga kebenaran dan memberikan ruang yang adil untuk semua partai politik, tanpa adanya bias atau intervensi yang merugikan proses demokrasi.

Penting untuk dicatat bahwa peran partai politik dalam pembentukan kebijakan publik tidak dapat dipisahkan dari partisipasi aktif masyarakat. Masyarakat sebagai pemilih memiliki tanggung jawab untuk memilih secara bijak dan kritis. Pendidikan politik yang memadai dan informasi yang akurat akan membantu masyarakat untuk membuat keputusan yang informasional dan menyeluruh.

Dalam menyikapi permasalahan ini, pemerintah juga harus turut serta dengan memberikan dukungan dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk reformasi internal partai politik. Penguatan regulasi dan penegakan hukum yang lebih ketat terhadap pelanggaran etika politik dapat menjadi landasan kuat untuk merespons permasalahan yang dihadapi.

Secara keseluruhan, peran partai politik dalam sistem politik Indonesia adalah sebuah hal yang kompleks dan tidak dapat diabaikan. Mereka adalah perwakilan legitimasi politik rakyat dan memiliki kekuatan untuk membentuk arah kebijakan nasional. Namun, untuk mencapai hal ini, diperlukan komitmen dari semua pihak, termasuk partai politik, pemerintah, masyarakat, dan media massa. Dengan melakukan perbaikan dan reformasi yang holistik, partai politik dapat menjadi motor penggerak demokrasi yang sehat dan berdaya tahan.

Bagaimana partai politik mempengaruhi proses pembuatan kebijakan publik

Partai politik, sebagai elemen pokok dalam sistem politik, memegang peran utama dalam proses pembuatan kebijakan publik. Ini melibatkan sejumlah fungsi dan mekanisme yang kompleks, yang menggambarkan dinamika hubungan antara partai politik, pemerintah, dan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, peran partai politik dalam proses pembuatan kebijakan publik menjadi lebih signifikan seiring perkembangan sistem demokrasi perwakilan.

Partai politik memiliki fungsi input dan output yang mendasar. Sebagai fungsi input, partai politik berperan sebagai sarana sosialisasi politik, yakni memberikan pemahaman politik kepada masyarakat. Mereka juga menjadi alat komunikasi politik, menyampaikan pesan dan platform politik kepada warga negara. Rekrutmen politik juga menjadi fungsi input, di mana partai politik mencari dan mendukung kader-kader politik yang dapat mewakili aspirasi masyarakat. Selain itu, partai politik berfungsi sebagai agregator kepentingan, menggabungkan berbagai kepentingan masyarakat ke dalam platform politiknya. Dan terakhir, partai politik memiliki fungsi artikulator, yakni menyampaikan aspirasi dan keinginan masyarakat kepada pemerintah.

Sebagai fungsi output, partai politik menjadi alat untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat dan memengaruhi kebijakan publik. Dengan representasinya di lembaga legislatif dan eksekutif, partai politik memiliki akses langsung untuk memperjuangkan dan merealisasikan agenda politiknya. Mereka juga dapat memberikan kontrol dan pengawasan terhadap pemerintah dalam implementasi kebijakan publik (Risnawan, 2017).

Partai politik mempengaruhi proses pembuatan kebijakan publik melalui beberapa mekanisme Parpol menjadi penentu kebijakan seperti yang tertera dengan Undang-Undang nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik Pasal 11 ayat 1 poin c dimana partai politik berfungsi sebagai sarana penyerapan, penghimpunan dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara (Risnawan, 2017). Pertama, partai politik memegang peran penting dalam menentukan agenda kebijakan publik. Mereka menentukan isu-isu yang akan diangkat dan diprioritaskan dalam proses pembuatan kebijakan. Keputusan ini dapat mencerminkan platform politik partai politik dan aspirasi masyarakat yang mereka wakili (Nugroho, 2015).

Kedua, partai politik memiliki pengaruh dalam proses pembuatan kebijakan publik melalui dukungan atau kritik terhadap kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah (Wardana, 2023). Dengan memiliki representasi di lembaga legislatif, partai politik dapat memberikan pandangan dan penilaian terhadap kebijakan yang diajukan oleh pemerintah.

Dukungan atau kritik ini dapat memengaruhi keputusan akhir pemerintah terkait implementasi kebijakan. Ketiga, partai politik juga memegang peran dalam mengawasi pemerintah selama pelaksanaan kebijakan publik (Wardana, 2023). Melalui peran anggotanya di lembaga eksekutif dan legislatif, partai politik dapat memastikan bahwa kebijakan yang telah disahkan dapat dilaksanakan dengan efektif dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Keempat, partai politik dapat memobilisasi masyarakat untuk mendukung atau menentang kebijakan publik tertentu (Rianty, 2023). Dengan memiliki jaringan dan basis massa yang luas, partai politik dapat menjadi penggerak opini publik. Hal ini dapat tercermin dalam aksi massa, kampanye publik, atau demonstrasi yang menjadi bentuk partisipasi politik masyarakat dalam memengaruhi kebijakan.

Namun, perlu diakui bahwa partai politik tidak selalu berperan secara positif dalam proses pembuatan kebijakan publik. Beberapa kendala dan tantangan dapat muncul, menggoyahkan integritas dan tujuan partai politik. Salah satu dampak negatif yang mungkin timbul adalah ketidaksetaraan representasi, di mana partai politik lebih memperjuangkan kepentingan kelompok tertentu daripada kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Fenomena ini dapat menyebabkan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya dan manfaat kebijakan.

Lebih lanjut, praktik korupsi dan nepotisme juga dapat menghambat proses pembuatan kebijakan publik yang adil dan transparan. Partai politik yang terlibat dalam tindakan korupsi dapat mengarah pada penyimpangan alokasi anggaran dan kebijakan yang merugikan masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan integritas dan akuntabilitas internal partai politik menjadi kunci untuk memastikan bahwa mereka berfungsi sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Dalam konteks Indonesia, peran partai politik dalam proses pembuatan kebijakan publik tidak bisa diabaikan. Dengan lebih dari 100 partai politik yang eksis pasca-era reformasi, dinamika politik semakin kompleks. Partai-partai politik tersebut memiliki peran mendasar dalam menentukan arah kebijakan dan memahami keinginan rakyat. Namun, tantangan seperti korupsi dan nepotisme juga menjadi isu yang perlu segera diatasi agar partai politik dapat berfungsi secara optimal.

Dalam menentukan agenda kebijakan publik, partai politik di Indonesia dapat terlibat dalam penyusunan manifesto dan program kerja yang mencerminkan visi mereka. Pemilihan isu-isu strategis yang relevan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat menjadi langkah awal dalam mempengaruhi arah kebijakan. Selain itu, partai politik dapat menggunakan platform politiknya untuk memberikan penekanan pada isu-isu prioritas yang dianggap penting bagi kepentingan umum.

Dalam memberikan dukungan atau kritik terhadap kebijakan pemerintah, partai politik di Indonesia memiliki forum debat dan diskusi di lembaga legislatif. Melalui rapat-rapat dan pembahasan, anggota partai politik dapat menyampaikan pandangan dan evaluasi mereka terhadap kebijakan yang diusulkan atau diimplementasikan oleh pemerintah. Dengan demikian, fungsi kontrol dan pengawasan dapat dijalankan sesuai dengan peran partai politik.

Namun, tidak dapat diabaikan bahwa partai politik di Indonesia juga menghadapi tantangan serius terkait praktik korupsi dan nepotisme. Beberapa partai politik dituding terlibat dalam praktik-praktik ini, yang dapat merusak integritas dan reputasi mereka. Oleh karena itu, perlu dilakukan reformasi internal yang melibatkan peningkatan transparansi dalam pengelolaan keuangan partai politik dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran etika.

Penting untuk menciptakan sistem pengawasan dan akuntabilitas yang kuat terhadap partai politik agar mereka dapat beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Lembaga pengawas independen dapat memainkan peran kunci dalam memeriksa dan memverifikasi laporan keuangan partai politik secara berkala. Ini membuka ruang untuk penyampaian laporan yang transparan kepada masyarakat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik.

Selain itu, pemberantasan praktik politik uang dan praktik korupsi menjadi krusial untuk menjaga integritas proses pemilihan umum dan keberlanjutan demokrasi. Penguatan aturan hukum dan penegakan hukum yang tegas dapat menjadi langkah efektif dalam memberantas praktik-praktik yang merusak demokrasi.

Dalam mengatasi permasalahan tersebut, partai politik juga dapat melibatkan masyarakat lebih aktif dalam proses politik. Kita dapat memahami bahwa kebijakan publik adalah rangkaian langkah yang diterapkan oleh pemerintah dan bersifat obligatif, di mana tujuan utamanya adalah menciptakan stabilitas dalam masyarakat. Terbentuknya kebijakan publik adalah hasil dari proses kerja sistem politik, di mana keluaran dari sistem politik tersebut menghasilkan kebijakan publik sebagai hasil akhir. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum, diskusi politik, dan kampanye sosial dapat menjadi langkah proaktif untuk membentuk pemberdayaan politik dan kesadaran masyarakat. Pendidikan politik yang efektif juga diperlukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya partai politik yang bersih dan akuntabel dalam menjalankan fungsi dan tugas mereka.

Media massa juga memiliki peran penting dalam membentuk opini publik dan mengawasi tindakan partai politik. Mereka harus berfungsi sebagai penjaga kebenaran dan

independen, menyampaikan informasi yang akurat dan obyektif kepada masyarakat. Keberagaman media massa juga perlu dijaga untuk memastikan bahwa berbagai pandangan dan opini dapat terwakili dengan adil.

Sebagai kesimpulan, partai politik memiliki peran sentral dalam proses pembuatan kebijakan publik, baik dalam konteks Indonesia maupun secara global. Fungsi input dan output partai politik menciptakan dinamika hubungan yang kompleks dengan masyarakat dan pemerintah. Dengan adanya partai politik yang kuat, dapat tercipta sistem demokrasi yang sehat dan berdaya tahan. Namun, tantangan seperti praktik korupsi, nepotisme, dan ketidaksetaraan representasi menjadi hambatan yang perlu diatasi untuk memastikan bahwa partai politik beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Dengan langkah-langkah konkret dan dukungan dari berbagai pihak, partai politik dapat menjadi motor penggerak dalam mencapai kebijakan publik yang berpihak pada kepentingan masyarakat secara menyeluruh.

## SIMPULAN

Dalam konteks sistem politik Indonesia, peran partai politik membentuk aspek integral dalam pelaksanaan demokrasi perwakilan. Partai politik bukan hanya menjadi penghubung antara rakyat dan pemerintah, tetapi juga memiliki dampak langsung dalam pembentukan kebijakan publik. Perannya mencakup beberapa dimensi yang kompleks, baik sebagai agen perubahan dalam masyarakat maupun sebagai pilar utama dalam representasi politik.

Pertama-tama, peran partai politik tercermin dalam tugas dan tanggung jawabnya, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang terkait. Partai politik memiliki kewajiban untuk menyiapkan calon pemimpin dan merancang kebijakan publik yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi rakyat. Oleh karena itu, partai politik bukan hanya entitas formal di atas kertas, melainkan agen dinamis yang terlibat aktif dalam membentuk arah kebijakan negara.

Era reformasi menjadi titik penting dalam sejarah partai politik Indonesia, di mana keberagaman partai politik meningkat secara signifikan. Meski ini mencerminkan minat masyarakat dalam proses politik, beberapa permasalahan muncul. Kurangnya kualitas kader, kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan, dan praktik politik uang menjadi tantangan serius yang perlu diatasi. Pentingnya partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum tidak dapat diabaikan, tetapi praktik politik uang mengancam esensi demokrasi. Oleh karena itu, partai politik dan pemerintah harus bersinergi untuk

meningkatkan kualitas kader, memperkuat transparansi keuangan, dan memberantas praktik politik uang.

Reformasi internal di dalam partai politik menjadi krusial, mencakup peningkatan seleksi kader, pelatihan kepemimpinan, dan mekanisme pengawasan yang lebih ketat. Transparansi keuangan partai politik juga perlu ditingkatkan, dengan laporan keuangan mudah diakses oleh masyarakat dan diperiksa oleh lembaga pengawas independen. Pemberantasan praktik politik uang memerlukan langkah-langkah hukum yang tegas dan peningkatan kesadaran masyarakat. Media massa memiliki peran penting dalam memberikan informasi yang akurat dan obyektif tentang kegiatan partai politik dan pemilihan umum.

Dalam mengatasi permasalahan ini, pemerintah juga perlu memberikan dukungan dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk reformasi internal partai politik. Regulasi yang lebih ketat dan penegakan hukum yang kuat terhadap pelanggaran etika politik dapat menjadi dasar kuat untuk merespons permasalahan yang dihadapi. Secara keseluruhan, partai politik adalah elemen kunci dalam dinamika sistem politik Indonesia. Dengan melakukan perbaikan dan reformasi yang holistik, partai politik dapat menjadi motor penggerak demokrasi yang sehat dan berdaya tahan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Naufal Dzulfaroh, S. H. (2023, 03 09). Fungsi, Peran, dan Tujuan Partai Politik. Diambil kembali dari Kompas.com: <https://www.kompas.com/tren/read/2023/03/09/203000265/fungsi-peran-dan-tujuan-partai-politik>
- AW, M. J. (2017). PERANAN PARTAI POLITIK DALAM DEMOKRASI DI INDONESIA. *Jurnal Administrasi Publik*, 12. [https://www.kompasiana.com/31\\_ranggawardana8940/644a96af08a8b564a65378a2/peran-penting-partai-politik-dalam-pemilu](https://www.kompasiana.com/31_ranggawardana8940/644a96af08a8b564a65378a2/peran-penting-partai-politik-dalam-pemilu). (2015). PERANAN PARTAI POLITIK DALAM DEMOKRASI DI INDONESIA. *Jurnal Administrasi Publik*, 12.
- Isabela, M. A. (2022, 03 24). Awal Mula Lahirnya Partai Politik. Diambil kembali dari Kompas.com -: [https://nasional.kompas.com/read/2022/03/24/02000011/awal-mula-lahirnya-partai-politik#google\\_vignette](https://nasional.kompas.com/read/2022/03/24/02000011/awal-mula-lahirnya-partai-politik#google_vignette)
- Iskandar, D. J. (2017). PENTINGNYA PARTISIPASI DAN PERANAN KELEMBAGAAN POLITIK DALAM PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN PUBLIK. *Jurnal Ilmu Administrasi Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 19.

- Nugroho, N. D. (2015, 06 26). Peran Partai Politik dalam Proses Pembuatan dan Penerapan Kebijakan Dalam Sistem Politik di Indonesia. Diambil kembali dari kompasiana: <https://www.kompasiana.com/nunungdwinugroho/5500ced2a33311537251222b/peran-partai-politik-dalam-proses-pembuatan-dan-penerapan-kebijakan-dalam-sistem-politik-di-indonesia>
- Rianty, N. (2023, february 20). Bagaimana partai politik mempengaruhi kebijakan publik? Diambil kembali dari sridianti Dot com: <https://www.sridianti.com/soal/bagaimana-partai-politik-mempengaruhi-kebijakan-publik.html>
- Ridwan. (2022). KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PUSARAN PARTAI POLITIK. PARAPOLITIKA, 82.
- Risnawan, W. (2017). PERAN DAN FUNGSI INFRASTRUKTUR POLITIK. *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 8.
- Wardana, r. (2023, april 27). Peran Penting Partai Politik dalam Pemilu. Diambil kembali dari [kompasiana: https://www.kompasiana.com/31\\_ranggawardana8940/644a96af08a8b564a65378a2/peran-penting-partai-politik-dalam-pemilu](https://www.kompasiana.com/31_ranggawardana8940/644a96af08a8b564a65378a2/peran-penting-partai-politik-dalam-pemilu)